

Ideologi Pancasila Dan Konstitusi

Right here, we have countless book **Ideologi Pancasila Dan Konstitusi** and collections to check out. We additionally pay for variant types and with type of the books to browse. The conventional book, fiction, history, novel, scientific research, as competently as various new sorts of books are readily available here.

As this Ideologi Pancasila Dan Konstitusi, it ends up being one of the favored ebook Ideologi Pancasila Dan Konstitusi collections that we have. This is why you remain in the best website to look the amazing book to have.

Ideologi Pancasila Dan Konstitusi Downloaded from ssm.nwherald.com by guest

BOND HAAS

Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Deepublish

Collection of articles on Pancasila, the Indonesian state philosophy.

Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila UNISNU PRESS
Kongres Pancasila IV ini merupakan rangkaian dan kesinambungan dari Kongres Pancasila sebelumnya, yaitu Kongres Pancasila I tgl 1 Juni 2009 di Yogyakarta; Kongres Pancasila II tgl. 1 Juni 2010 di Denpasar; dan Kongres Pancasila III tgl.1 Juni 2011 di Surabaya. Dari tiga kali Kongres Pancasila tersebut telah banyak dihasilkan rumusan-rumusan deklarasi yang sangat berkualitas dan bermakna. Atas dasar hasil-hasil yang telah dicapai dari Kongres Pancasila sebelumnya itu, maka pada Kongres Pancasila IV kali ini dipilih dan ditetapkan tema “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Tema ini dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Saat ini tidak ada lembaga khusus pengawal Pancasila. Padahal, diakui atau tidak Pancasila adalah dasar Negara Indonesia. Keadaan ini dinilai jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Saat itu, MPR mempunyai berbagai wewenang, dan salah satunya “memelihara” Pancasila. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila itu menyebabkan Pancasila kehilangan dasar legitimasi kenegaraannya. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila, berimplikasi pada tidak adanya mekanisme yang jelas dalam mensosialisasikan Pancasila. Peran tersebut saat ini nampaknya berusaha dimainkan oleh MPR dengan slogan kebanggaannya “4 Pilar Hidup Bernegara” yang mensejajarkan posisi Pancasila dengan NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari ketidaktepatan konsep dasar yang ada dalam slogan itu, kita mengakui bahwa MPR memiliki niat baik untuk membunikan Pancasila. Saat ini tidak ada rambu-rambu pengimplementasian Pancasila yang jelas dan baku. Padahal, rambu-rambu itu mutlak diperlukan agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, rambu-rambu itu perlu segera diadakan. Mempertimbangkan hal-hal diatas, kiranya perlu ada upaya serius untuk membentuk atau menunjuk lembaga khusus pengawal Pancasila, yang nantinya diberi wewenang, antara lain untuk menyusun rambu-rambu pengimplementasian Pancasila tersebut secara tepat, terstruktur, dinamis dankontekstual.

A Study of Logic, Law, Omnipotence, and Change Jakad Media Publishing

Buku ini di khususkan untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila yang merupakan Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) berbasis Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan belajar mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Pendidikan Pancasila.

DIKTAT RESMI TES MASUK KAMPUS IKATAN DINAS STAN STIS CV. Social Politic Genius (SIGN)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyusunan buku ini disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dan inti pendidikan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pokok-pokok materi tersajikan secara sistematis, meliputi: Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila sebagai Sistem Filsafat Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Identitas Nasional dan Multikulturalisme Negara dan Konstitusi Peraturan Perundang-undangan Demokrasi Indonesia Negara Hukum, Rule of Law, dan HAM Hak dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional Otonomi Daerah Korupsi di Indonesia Praksis Good dan Clean Governance Materi buku ini tersajikan sesuai landasan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui bahasa penyampaian yang lugas, ilmiah dan sistematis menjadikan buku ini mudah untuk dipahami. Buku ini sangat tepat digunakan rujukan oleh semua pihak baik guru, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.

Reideologi Pancasila Pusat Studi Pancasila UGM

Kehadiran buku ini dimaksudkan sebagai referensi yang memudahkan mahasiswa dalam mencerna materi kuliah Pendidikan Pancasila yang penulis ampu. Karena berdasarkan pengalaman penulis selama ini, mahasiswa menemui berbagai

kendala dalam memahami Pancasila. Adapun faktor utama yang ditengarai menghambat dan mempersulit struktur kognitif mahasiswa dalam meresapi Pancasila, yaitu materinya yang kurang kontekstual dan terlampau filosofis. Dua faktor tersebut tanpa disadari telah mengaburkan pandangan obyektif mahasiswa terhadap kelebihan Pancasila dibanding ideologi lainnya. Hal itu berimplikasi negatif pada persepsi mahasiswa, yang merasa tidak memperoleh manfaat apapun setelah mempelajari Pancasila. Parahnya lagi, mahasiswa keliru menginternalisasikan Pancasila dalam kepribadiannya. Pemahaman yang keliru tentunya mengantarkan mahasiswa pada aras implementasi dan aktualisasi Pancasila yang gagal pula. Pada tataran praktisnya, Pancasila tidak termaknai dengan baik dalam kehidupan mahasiswa. Kegagalan mahasiswa dalam mengintegrasikan Pancasila dengan pola pikir, sikap, dan perilakunya menandakan telah terjadinya pergeseran orientasi yang mengarah pada kemunduran peradaban bangsa Indonesia. Tidak dapat dibayangkan betapa mengerikannya kondisi Indonesia, bila Pancasila yang notabene ideologi bangsa tidak mengakar kuat sebagai fondasi intelektual generasi penerusnya.

Teori dan Hukum Konstitusi Sinar Grafika
Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa memiliki kesejarahannya sendiri. Sejak perumusan di BPUKPI hingga masa paska Reformasi, telah muncul berbagai tafsir dan penjabaran strategis atas nilai-nilai Pancasila. Pada masanya, tafsir Pancasila pernah terseret dalam pertentangan ideologis yang nyaris memecah belah bangsa, sebagaimana terjadi pada masa Konstituante hingga tragedi bangsa di tahun 1946/ Belajar dari konflik ideologi di masa sebelumnya, rezim Orde Baru kemudian mengedepankan pembangunan ekonomi dengan menekan secara kuat konflik-konflik ideologis dengan menggunakan jargon Pancasila dala sebagai azas tunggal. Lepas dari represi ideologis dengan tafsir tunggalnya, bangsa Indonesia masuk dalam euforia kebebasan, yang juga berimbas pada terpinggirkannya Pancasila dalam wacana kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahkan sampai pada detik ini kemerdekaan yang kita peroleh masih bersifat "semu". Secara prinsipal, bangsa ini masih terjajah dalam semua bidang baik politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan.

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Yudhistira Ghalia Indonesia
Setiap Negara pasti memiliki dasar dan ideologi Negara yang berbeda-beda. Dalam penemuan dasar dan ideologi Negara tersebut sudah tentu memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Seperti di Indonesia, sejarah penentuan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara di mulai dari sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia Mulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai sampai pada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam bahasa jepangnya disebut Dokuritsu Zyunbi linkai. Sila-sila Pancasila tidak ditetapkan dengan begitu saja oleh para pendiri bangsa (The Founding Fathers) untuk menjadi dasar dan ideologi Negara Indonesia, tetapi nilai-nilai pancasila digali dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan disusun sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa dan utuh menjadi sila-sila pancasila yang digunakan sampai saat ini. Sehingga dari bentuknya ideologi pancasila merupakan ideologi terbuka. Buku ini terdiri dari 4 BAB dan di dalam buku ini akan di bahas tentang sejarah munculnya Pancasila sampai pada ditetapkannya Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, sehingga didalam mempelajari pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara bisa menjadi utuh.

PANDUAN TES RESMI CPNS & BUMN 2018-2019 Penerbit Lakeisha

Permasalahan yang dikaji dalam buku ini terinspirasi oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis dengan teman sejawat peneliti yang lain yang memfokuskan kajiannya pada permasalahan yang dihadapi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam sejak tahun 1996 sampai 2008. Penelitian Pertama, dengan judul “Dampak Undang-Undang Pemerintahan Desa Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat di Irian Jaya, Kalimantan, Pulau Tual, Pulau Haruku, dan Nusa Tenggara Timur)”, yang didanai oleh Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (ELSAM) dan USAID, (1996). Kedua, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan dan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” didanai oleh LIPI dan MENRISTEK melalui program penelitian Riset Unggulan Terpadu, (1999-2001). Ketiga, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Sistem Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mencapai Kedaulatan Pangan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) yang didanai oleh Program Research Grant I-MHERE Universitas

Brawijaya (2008). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem hukum nasional yang sentralistik, hegemonik, ambivalen, dan sangat represif terhadap masyarakat adat telah menempatkan mereka pada posisi yang kalah, tersisih bahkan teralienasi dalam pergulatan memperebutkan kuasa hak atas pengelolaan sumberdaya alam. Melalui rangkaian penelitian yang panjang tersebut (1999-2009), peneliti kemudian ingin mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut keberadaan politik hukum ketahanan pangan nasional, keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat, khususnya masyarakat Adat Tengger Ngadas dalam pengelolaan sumber daya alam serta hambatan dan tantangan yang dihadapinya, khususnya dalam mewujudkan keadalaan pangan dalam sebuah disertasi. Akumulasi hasil penelitian tersebut, digunakan sebagai dasar pijakan untuk merekonstruksi politik hukum ketahanan pangan nasional agar memiliki basis yang kuat pada sistem kearifan lokal masyarakat adat.

Prosiding Kongres Pancasila VI Prenada Media
Negara Indonesia adalah sebuah negara yang luas yang juga didiami oleh ratusan juta penduduk. Sejak dahulu juga Indonesia telah memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat, tercermin dalam satu ikatan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia juga merupakan sebuah bangsa religius yang mengakui adanya Tuhan. Hal itu dapat dilihat dalam ideologi dan konstitusi, yang mengatur perihal hak asasi dan kebebasan beragama dan menganut kepercayaan. Dalam butir-butir ideologi serta konstitusi juga ditegaskan perihal kebebasan untuk menganut kepercayaan dan mendapatkan pelayanan yang setara sebagai hak asasi. Dalam buku ini dibahas mengenai permasalahan pemenuhan hak konstitusional penganut kepercayaan dalam memperoleh statusnya sebagai penganut kepercayaan yang sejak lama belum dapat dipenuhi negara bahkan setelah putusan mahkamah konstitusi (PMK) No. 97/PUU-XIV/2016. Buku ini membahas sejumlah hal yang dibagi ke dalam beberapa bab, antara lain mengenai teori negara hukum, teori perlindungan hukum, serta beberapa hal terkait eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami kajian kajian dalam hukum konstitusi dan hukum hak asasi manusia sehingga dapat ikut serta dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

HAKIKAT DAN MAKNA PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA Zifatama Jawa

Buku ini mendeskripsikan perjalanan panjang eksistensi Peradilan Agama dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tentang kompetensi Peradilan Agama yang selalu dinamis dari waktu ke waktu. Buku ini menguraikan secara komprehensif penerapan hukum Islam antara daerah satu dan daerah lainnya dan regulasi yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama. Selanjutnya dipaparkan pula analisis konstelasi politik dan teori-teori yang memengaruhi terjadinya pergeseran kompetensi Peradilan Agama beserta kelompok-kelompok yang pro dan kontra serta sikap masing-masing terhadap eksistensi Peradilan Agama. Buku perlu dibaca oleh mahasiswa yang menekuni ilmu-ilmu keislaman dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam peradilan agama di tanah air untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan, baik secara teori maupun praktik. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan* Bumi Aksara
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi.

Pancasila Satu-Satunya Ideologi Bangsa Indonesia Dan Amanat Pembukaan UUD 1945 Satu-Satunya Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prenada Media
Buku dengan judul “Teori dan Hukum Konstitusi” hadir untuk melengkapi referensi ilmu hukum khususnya para penstudi hukum konstitusi di Indonesia. Bagi mahasiswa dan akademisi hukum setidaknya buku ini bisa menjadi salah satu pilihan sumber acuan dan referensi proses pembelajaran atau perkuliahan di kampus. Ikhwal studi terhadap aspek teoritis dan dimensi yurisdiksi konstitusional selama ini masih jarang dialogi

dan dikembangkan oleh pencinta ilmu hukum. Karena itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mozaik pemikiran kita mengenai studi terhadap hukum konstitusi tersebut.

Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII Bumi Aksara

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1

Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Pandiva Buku

Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi. Oleh sebab itu cakupan materi konstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini cukup luas dan padat. Faktor itulah yang menyulitkan penulis untuk mengkompilaskannya dengan materi lain yang pada umumnya dimuat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah bagian materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya, seperti Pancasila, Identitas Nasional, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi dan Rule Of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia akan dibahas secara terpisah dalam buku tersendiri.

Kewarganegaraan PT Grafindo Media Pratama

Untuk menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas, sistem seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan secara jujur dalam keseluruhan tahapan seleksi, transparan terkait keseluruhan tahap dan informasi hasil tes kepada seluruh peserta tes dan masyarakat melalui media online dan tidak dipungut biaya.

Sistem Seleksi dilakukan dengan sistem gugur pertahapan tes.

Materi seleksi penerimaan calon Praja IPDN terdiri dari Seleksi Administrasi dan Materi Tes. Materi Tes terdiri dari: Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem CAT oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); Tes Kesehatan oleh Pusat Kesehatan TNI; Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat; dan Tes Pantukhir oleh Tim Seleksi.

Materi dan Penilaian TKD meliputi: a. Jumlah soal 100 dengan waktu tes 90 menit b. Cara penilaian, dengan Persentase: -Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) : 40% x 175 = 70 -Tes Intelegensi Umum (TIU) : 50% x 150 = 75 -Tes Karakteristik Pribadi (TKP) : 72% x 175 = 126 c. Setiap soal (TWK dan TIU) yang jawabannya benar mendapat nilai 5 dan salah mendapat nilai 0 d. Setiap soal TKP tidak ada jawaban benar ataupun salah, nilai terkecil mendapat nilai 1 dan nilai terbesar mendapat nilai 5 (Skala 1-2-3-4-5) e. Total nilai tertinggi (TWK, TIU dan TKP) adalah 500 (semua jawaban benar) dan nilai terendah 35. f. Untuk lolos, setiap peserta harus memenuhi Nilai Ambang Batas TKD Buku ini sangat lengkap. Isinya merupakan gabungan dari buku TOP SUKSES Tes Masuk IPDN dan Diktat Terlengkap CPNS. Sangat tepat untuk bahan persiapan menghadapi SPCP IPDN

JUDUL:BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN PENULIS:TIM LITBANG

PSIKOLOGI SALEMBA ISBN:978-602-5454-11-0 PENERBIT:FORUM

EDUKASI HALAMAN:848 UKURAN:19 X 26 TANGGAL

TERBIT:JANUARI 2018 BukuEdukasi.Com BuEd.Com

Spiritualisme Pancasila Pusat Studi Pancasila UGM

Buku Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat 5.0 ini memberikan pemahaman tentang perkembangan civic education di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri kajian tentang multikulturalisme sebagai 'setting' sosial Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia. Pemahaman mengenai hal demikian itu sangat bermanfaat bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Pentingnya pendidikan multikultural karena merespons Indonesia yang ragam akan budaya dan memiliki masyarakat majemuk. Buku ini, diperuntukan bagi para mahasiswa program sarjana yang sedang menempuh studi Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu juga dapat digunakan oleh para pembaca yang memiliki bidang minat dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, baik sebagai domain sosiokultural, domain kurikuler, maupun sebagai domain kajian-kajian ilmiah.

Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan Universitas Brawijaya Press

Indonesia memiliki yang disebut "kerawanan kritis" (critical vulnerability) yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik antara lain karena, bangsa Indonesia tidak terlahir sebagai suatu bangsa yang sudah ada. Indonesia dibentuk berdasarkan keinginan dari berbagai suku bangsa, agama, RAS dan antar golongan untuk bersatu yang setelah merdeka dikonstitusikan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun demikian, konsensus tersebut masih meninggalkan residu permasalahan yaitu masih adanya keinginan sebagian anak bangsa untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain (komunis, kapitalis, khilafah). Ada pula yang ingin membentuk federasi dan beberapa wilayah ingin memisahkan diri. Selain itu, belum adanya pengaturan hubungan pusat dan daerah yang setepat-tepatnya akan berakibat sering terjadi konflik kepentingan antara daerah dengan pusat, sebab masih ada kelompok anak bangsa merasa mayoritas yang paling berjasa mewujudkan kemerdekaan daripada yang minoritas. Perlu diingat bahwa pusat kekuatan strategi bangsa Indonesia terletak di dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kesatuan Reppublik Indonesia

Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum

Positif di Indonesia Pancasila Satu-Satunya Ideologi Bangsa Indonesia Dan Amanat Pembukaan UUD 1945 Satu-Satunya Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar konstitusi negara (drait constitutionnel) UUD 1945 mempunyai sisi kesejarahan yang tak dapat dipisahkan dari gagasan founding fathers, termasuk konstruksi substansinya. Praktik yang tidak sesuai dengan konstitusi akan semakin

menjauhkan negara dari harapan dan cita-cita pendirian republik. Meski tidak dipungkiri, penafsiran terhafap konstitusi berkembang dan menguat seiring kebutuhan akan referensi dalam praktik penyelenggaraan negara. Namun, kontekstualisasi tidak selalu bermakna dekonstruksi. Ada keterhubungan nilai antara realitas dan nilai yang di tawarkan konstitusi. Konstitusi menjadi bebas tafsir ketika muatan kepentingan politik lebih dominan. Keinginan dari zaman ke zaman untuk menafsir konstitusi sesuai kepentingan politiknya terbukti mengantarkan negeri ini pada ambang kehancuran. Jelas konstitusi bukan mainan, yang dapat ditafsirkan relatif, sesuai hazard penguasa. Lebih lanjut, sebagian besar nilai-nilai universalitas dalam UUD 1945 ternyata telah akrsb dengan syariat islam. Secara formal-legalistik, Dekrit Presiden 1959 melegitimasi. Dekrit mengehendaki esensi piagam Jakarta yang akan tetap dijadikan dasar dalam menyusun peraturan perundang undangan.

Sutasoma Elex Media Komputindo

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru yang meliputi (1) Pengantar Pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa, (3) Pancasila sebagai Dasar Negara, (4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional, (5) Pancasila sebagai Filsafat, (6) Pancasila sebagai Etika, dan (7) Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Cakupan materi ini merupakan hasil pembaruan atas substansi kajian Pendidikan Pancasila sebelumnya, yakni kajian Pendidikan Pancasila berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No.

38/Dikti/Kep/2002. Pembaca nantinya akan menemukan sajian materi yang disusun secara sistematis, berkesinambungan, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Amat baik digunakan sebagai sumber belajar untuk perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk semua bidang jenjang sarjana maupun diploma.

BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN LKIS PELANGI AKSARA

The 14th century Javanese epic poem, Sutasoma, relates the life of a prince, born an incarnation of the Jina-Buddha Wairocana. It follows his spiritual journey to enlightenment and his temporal journey through marriage, kingship and eventual victory over the mighty, world-threatening demon, Porusada. Kate O'Brien's new translation delivers to the reader a highly approachable and lively rendition of this Buddhist epic, comparable in both complexity and scale to that of the Ramayana, yet significantly less known or understood.